

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2019



**Badan Pusat Statistik
Kota Malang**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2019



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MALANG 2019

Katalog BPS : 4102004.3573

No Publikasi : 35730.

Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : vi + 62 halaman

Naskah : Ratri A. Ratih

Editor : Ernawaty

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh : BPS Kota Malang

Dicetak oleh : BPS

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2019” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Kesehatan. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, SDKI dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Malang, September 2020
BPS Kota Malang
Kepala



Drs. Sunaryo, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin	2
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	3
1.3 Angka Beban Ketergantungan	4
1.4 Fertilitas	6
1.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi	7
2. Kesehatan	11
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	12
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi balita	15
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	18
3. Pendidikan	21
3.1 Angka Buta Huruf	22
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	23
3.3 Tingkat Pendidikan	23
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	24

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan	26
4. Ketenagakerjaan	29
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka	29
4.2 Tingkat Pengangguran T erbuka	32
4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan.....	33
4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	34
4.5. Jumlah Jam Kerja	35
5. Taraf dan Pola Konsumsi	37
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	37
6. Perumahan dan Lingkungan	41
6.1 Kualitas Rumah Tangga	42
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	43
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tangga	44
7. Kemiskinan	47
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur	47
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	48

8.	Sosial Lainnya	51
8.1	Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan	51
8.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	51
8.3	Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis	53
8.4	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	56
	Lampiran	58

<https://malangkota.bps.go.id>



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi.

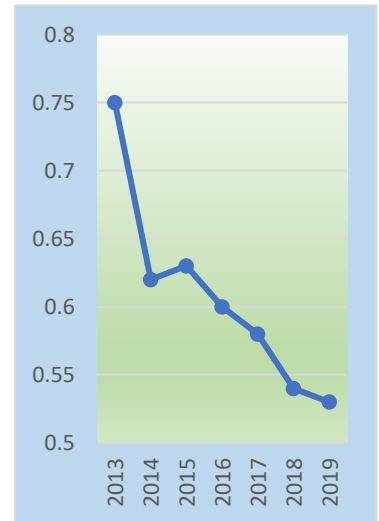
Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga

kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1 Jumlah laju Pertumbuhan penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2019 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010 tercatat sebanyak 870,862 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 4,744 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 yang mencapai 866,118 jiwa. Bila dibandingkan dengan delapan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Malang saat ini mengalami peningkatan sekitar 5,02 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 820.243 jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu tujuh tahun terakhir jumlah penduduk Kota Malang telah mengalami pertambahan penduduk sebesar 41.171 jiwa.



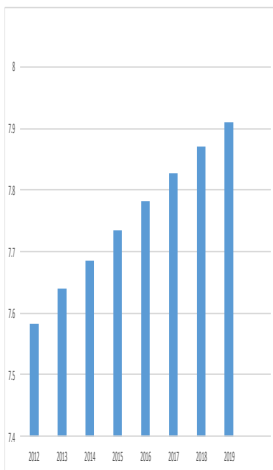
Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	840.803	0,75	97,51
2014	845.973	0,62	97,20
2015	851.298	0,63	97,25
2016	856.410	0,60	97,27
2017	861.414	0,58	97,30
2018	866 118	0,54	97,26

2019	870,682	0,53	97,31
------	---------	------	-------

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2013-2019

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Malang pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,53 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan penduduk Kota Malang sebesar 0,75 persen. Dalam kurun waktu 2013 s.d 2019 laju pertumbuhan menunjukkan keadaan yang berfluktuasi, tetapi cenderung melambat. Perlambatan laju pertumbuhan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah. Laju Pertumbuhan penduduk Kota Malang masih diatas Jawa Timur. Tahun 2019 Jawa Timur mencapai 0,50 persen.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 97,31. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 97 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Malang lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Malang lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Timur, yaitu sebesar 97,53.



Gambar 1.2
Kepadatan
Penduduk Kota
Malang Tahun 2012 -
2019

1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kota Malang yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kota Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2014 meningkat menjadi sekitar 7.686 jiwa per km², selanjutnya pada tahun 2015 sekitar 7.735 per jiwa km², dan tahun 2016 sekitar 7.781 jiwa per km² serta tahun 2017 sekitar 7.827 jiwa per km². Sedangkan pada tahun 2018 kepadatan penduduk Kota Malang sekitar 7.870 jiwa per km² dan tahun 2019 kepadatannya 7.911 jiwa per km².

Kota Malang merupakan kota terpadat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, yaitu sebesar 8.707 jiwa per km². Kecamatan Klojen meskipun pertumbuhan penduduknya rendah tetapi merupakan kecamatan terpadat di Kota Malang, kepadatannya mencapai 11.554 km².

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting.

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2013-2016 angka beban ketergantungan setiap tahun tetap yaitu 37,64. Tahun 2017 dan tahun 2019 angka beban ketergantungan meningkat menjadi 37,65. Keadaan ini dapat diartikan bahwa periode 2013-2019, 100 penduduk usia produktif dalam hal ini adalah kel usia 15-64 tahun harus menanggung 37 sampai 38 penduduk usia tidak produktif, yaitu kelompok usia 0-14 tahun dan kel usia 65 tahun ke atas.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kota Malang, Tahun 2013-2019

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	182.291	610.876	47.636	37,64
2014	183.388	614.628	47.957	37,64
2015	184.521	618.483	48.294	37,64
2016	185.605	622.188	46.617	37,64
2017	186.666	625.812	48.936	37,65
2018	177.223	633.712	55.183	37,65
2019	188.627	632.531	49.524	37,65

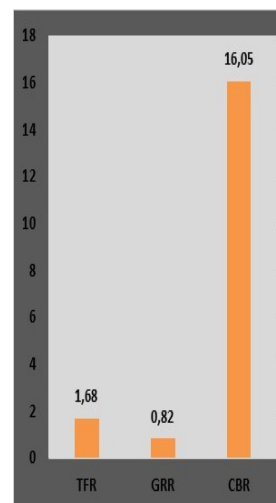
Sumber : *Proyeksi Penduduk Kota Malang 2013-2019*

Rasio ketergantungan yang meningkat perlu mendapat perhatian karena semakin banyak usia yang tidak produktif yang ditanggung oleh usia produktif. Kondisi ini menjadi peringatan awal untuk mempersiapkan kelompok usia produktif terserap di pasar kerja. Hal ini akan sangat terkait dengan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari komponen nilai tambah yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

1.4 Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*). Indikator TFR



Tabel 1.3
Indikator Fertilitas, 2010

mempunyai kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa TFR Kota Malang sebesar 1,68. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 1 sampai 2 anak.

GRR adalah banyaknya bayi perempuan yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksi. Ukuran ini tidak memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. GRR Kota Malang tahun 2010 sebesar 0,82. Artinya terdapat 0 sampai 1 orang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.

CBR adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Indikator CBR digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. CBR Kota Malang pada tahun 2010 sebesar 16,05. Artinya pada tahun 2010 banyaknya kelahiran sebanyak 16 anak per 1000 penduduk.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan alat kontrasepsi yang beragam jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk

kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018-2019, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 56,62 persen pada tahun 2018 dan 64,10 persen pada tahun 2019. Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan paling banyak diminati., demikian juga AKDR/IUD/spiral. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 penggunaan AKDR/IUD/Spiral peminatnya menurun dari 26,72 persen dan Suntik meningkat dari 37,44 persen menjadi 51,96 persen. Sedangkan pengguna Pil KB mengalami peningkatan dari 14,56 menjadi 17,81 persen.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2018 dan 2019

Alat/Cara Kontrasepsi	2018	2019
(1)	(2)	(3)

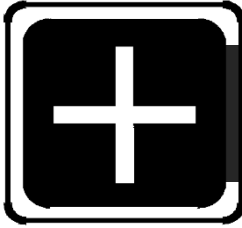
MOW/Tubektomi	8,31	4,80
MOP/Vasektomi	0,81	0,70
AKDR/IUD/Spiral	26,72	11,34
Suntikan	37,44	51,96
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	2,3	9,46
Pil	14,56	17,81
Kondom/Karet	3,21	1,75
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,00	0,00
Cara Tradisional	6,83	2,17
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	56,52	64,10

Sumber : Hasil Susenas, 2018-2019

Selain alat kontrasepsi AKDR/IUD/Spiral dan pil, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah MOW/Tubektomi, pil, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan cara Tradisional. Pada tahun 2018 penggunaan MOW/Tubektomi sebesar 8,31 persen dan mengalami penurunan menjadi 4,80 persen pada tahun 2019. Sedangkan penggunaan Susuk KB/Norplant/Implanon mengalami peningkatan dari 2,3 persen pada tahun 2018 menjadi 9,46 persen pada tahun 2019. Penggunaan kondom juga mengalami penurunan dari 3,21 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 1,75 persen pada tahun 2019. Cara Tradisional tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 6,83 persen menjadi 2,17 persen.

Jenis alat/cara KB yang tidak ada peminatnya adalah intravag/tissue/kondom wanita. Hal ini diduga karena sosialisasi informasi masih kurang optimal sehingga banyak yang masih belum berminta memilih alat kontrasepsi ini.

<https://malangkota.bps.go.id>



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas

pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1. Derajat Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) dan usia harapan hidup.

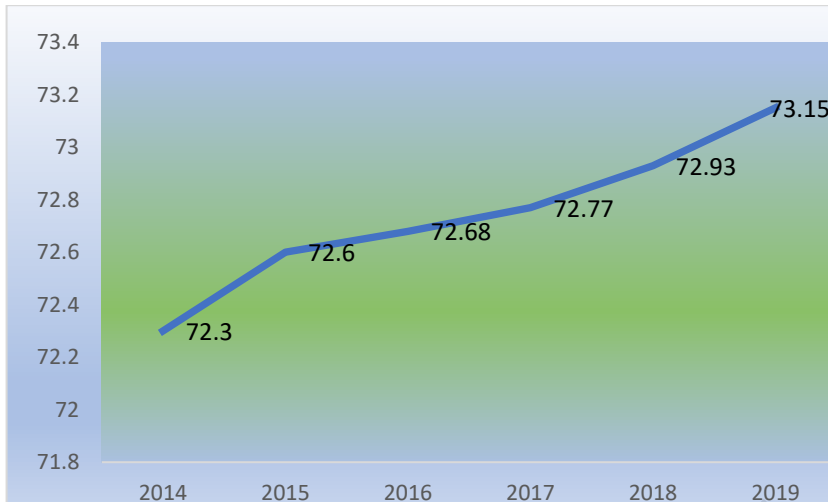
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan angka 1 (satu) dikurangi angka kematian bayi. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan.

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Setiap tahunnya diseluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis, dan komplikasi berat lahir rendah (Depkes RI, 2008).

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan



Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Malang Tahun 2014-2019

Sumber : BPS Kota Malang

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Dari hasil penghitungan propyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Kota Malang selama 6 tahun terakhir (2014 – 2019) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 72,3 (2014) menjadi 73,15 (2019). Artinya peluang bayi yang dilahirkan hidup akan memiliki peluang untuk hidup sampai umur 72 sampai 73 tahun. AHH Kota Malang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur , yaitu 70,45 sampai 71,18 tahun.

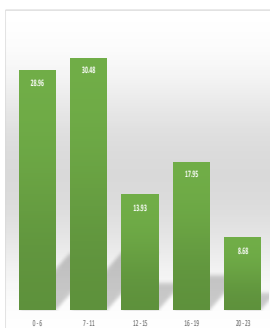
Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan

pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Berdasarkan hasil Susenas 2019, sekitar 34,00 persen penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Angka ini di bawah angka Jawa Timur yang sebesar 35,59 persen.

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan



Gambar 2.2
Persentase Baduta di Kota
Malang Menurut Lamanya
Pemberian ASI, 2019

keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Kualitas dan kuantitas ASI yang diberikan pada bayi sangat berkaitan dengan asupan gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibu, terutama saat ibu hamil dan setelah melahirkan (masa menyusui). ASI sebenarnya memang langsung dikenalkan pada bayi mulai saat lahir, proses ini disebut dengan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).

Dari data Susenas 2019 persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kota Malang yang melahirkan anak lahir hidup kurang dari 2 tahun yang lalu sebanyak 84,44 persen sudah melakukan IMD kurang dari 1 jam setelah kelahiran bayi, namun masih ada sebanyak 15,56 persen yang melakukan IMD lebih dari 1 hari. Dalam perkembangannya sebanyak 98,92 persen anak dibawah usia dua tahun pernah menerima ASI dan 1,08 persen tidak merasakan ASI. Dari sekitar 98,92 persen baduta yang menerima ASI sebagian besar menerima ASI kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 65,5 persen sedangkan yang menerima hingga usia 23 bulan sebesar 8,38 persen.

Hal yang tak kalah penting dalam melindungi balita pada masa tumbuh kembangnya dan menjaga kesehatannya hingga dewasa adalah pemberian Imunisasi. Imunisasi merupakan prosedur pencegahan penyakit menular yang diberikan kepada anak sejak masih bayi hingga remaja. Melalui program ini, tubuh diperkenalkan dengan bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang sistem imun guna membentuk antibodi. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi berguna untuk melindungi tubuh dari serangan mikro organisme tersebut di masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan kekebalan aktif.

Bayi yang baru lahir memang telah memiliki antibodi dari ibunya yang diterima saat masih di dalam kandungan. Namun kekebalan ini hanya dapat bertahan hingga beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu bayi akan rentan terhadap berbagai

jenis penyakit dan perlu mulai memproduksi antibodinya sendiri. Dengan imunisasi, sistem kekebalan tubuh anak akan siap untuk menghadapi penyakit menular tertentu di masa depan, sesuai dengan jenis vaksin yang diberikan. Karena imunisasi secara tepat pada balita dapat bermanfaat dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Sehingga melalui imunisasi diharapkan dapat menurunkan jumlah kematian bayi dan balita.

Pada tahun 2019 balita di Kota Malang yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap (satu kali untuk BCG dan Campak, serta tiga kali untuk DPT, Polio, dan Hepatitis B) sebanyak 58,95 persen dan jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sekitar 3,24 persen.

Dalam kurun waktu 5 tahun berdasarkan hasil Susenas 2017-2019 pemberian imunisasi kepada anak umur 12-59 bulan sudah mencapai lebih dari 90 persen, untuk hamper semua jenis imunisasi, kecuali imunisasi campak yang masih sekitar 80% persen. Persentase pemberian imunisasi Campak dan DPT cenderung menurun dibandingkan tahun 2018, kecuali pemberian imunisasi Polio meningkat dari 94,44 persen menjadi 95,50 persen.

Jenis Iminusasi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BCG	97,90	96,08	96,83	95,39	-	92,45
DPT	97,43	98,93	95,93	93,33	94,91	89,99
Polio	96,70	100	97,80	95,39	94,44	95,50
Campak	80,72	76,15	74,43	77,45	94,91	71,24
Hepatitis B	95,75	97,48	96,73	93,65	-	96,93

Tabel 2.2 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, Tahun 2013 – 2019

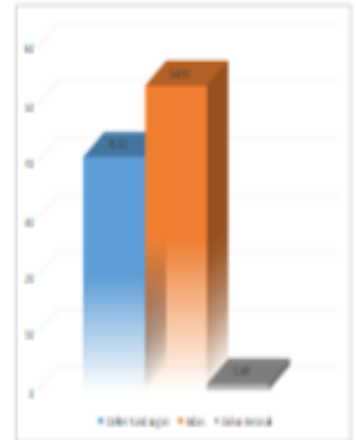
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2014, 2015, 2015,2016,2017, 2018, dan 2019

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Dari hasil Susenas 2019 diperoleh gambaran bahwa perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun di Kota Malang yang melahirkan anak lahir hidup kurang dari 2 tahun yang lalu berdasarkan tempat melahirkan anak terakhir terlihat bahwa yang melahirkan di Bidan sebesar 53,49 persen diurutkan teratas dan disusul dokter kandungan diurutkan kedua sebesar 41,02 persen, selanjutnya di Praktek Dukun Beranak sebanyak 1,39 persen.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke



Gambar 2.3
Persentase Perempuan yang melahirkan anak menurut tempat melahirkan, 2019

fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Dalam mengatasi keluhan kesehatan yang dialami, ada sekitar 45,37 persen penduduk berobat jalan sedangkan 54,63 persen tidak melakukan berobat jalan. Berbagai alasan penduduk tidak berobat jalan dalam mengatasi keluhan kesehatannya, yang paling besar adalah karena mereka mengobati sendiri keluhan kesehatannya yaitu sebesar 67,27 persen dan berikutnya 29,13 persen karena merasa tidak perlu untuk berobat jalan karena keluhan kesehatan yang dirasakan dianggap biasa dan tidak perlu berobat jalan. Penduduk yang berobat jalan kebanyakan mendatangi tempat praktek dokter/bidan yaitu sebesar 74,57 persen dan berikutnya yang banyak didatangi adalah Puskesmas/Pustu sebesar 15,34 persen.

Tempat berobat jalan yang paling sedikit dikunjungi oleh penduduk Kota Malang adalah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan Balai Pengobatan sebanyak 3,62 persen. Sedangkan pengobatan tradisional/alternative dikunjungi oleh sebanyak 0,80 persen penduduk Kota Malang yang berobat jalan. Dari data yang dihasilkan oleh Susenas ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Malang lebih banyak mendatangi praktek dokter/bidan dikarenakan banyaknya praktek dokter/bidan yang sudah tersedia di setiap kelurahan.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2015 – 2019

Tempat Berobat	2015	2016	2017	2018	2019
----------------	------	------	------	------	------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit	13,78	18,38	23,14	31,16	13,99
Praktek Dokter atau klinik	50,11	46,72	54,41	42,52	74,57
Puskesmas	37,38	35,77	26,47	29,39	15,34
Petugas Kesehatan	0,18	0,14	0,75	0,93	3,62
Pengobatan Tradisional	1,67	2,18	1,89	4,84	0,80
Dukun bersalin & lainnya	2,18	0,87	0,20	2,63	0,30

Sumber : Hasil Susenas 2013-2019

<https://malangkota.bps.go.id>



3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui

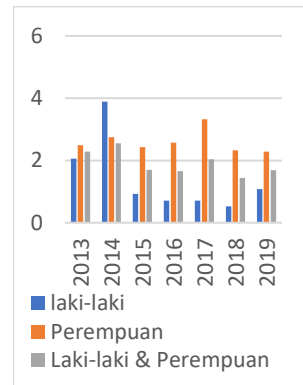
pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kota Malang menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, serta angka putus sekolah dan angka mengulang.

3.1 Angka Buta Huruf

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braille.

Sebagai salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Kota Malang 2019 mencapai 1,69 persen. Dari penduduk usia di atas 10 tahun, sekitar 1,69 persen belum bisa membaca dan menulis. Dirinci menurut jenis kelamin, angka buta huruf perempuan (2,28 persen) lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki (1,08 persen).

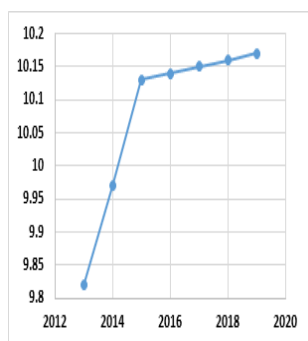


Gambar 3.1.
Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota Malang, 2013-2019 (Persen)

Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Kota Malang urutan ke Itiga terendah angka buta hurufnya, setelah Kabupaten Siidoarjo dan Kota Surabaya. Sementara persentase penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 1,08 persen dan perempuan 2,28 persen, disini terlihat bahwa persentase buta huruf laki- laki lebih rendah dibanding angka buta huruf perempuan.

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kota Malang tahun 2019 mencapai 10,17 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Malang yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 10 sampai 11 tahun atau setara dengan kelas XI tingkat SMA. Capaian ini menunjukkan bahwa target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahun telah tercapai di Kota Malang. Dalam kurun waktu 2013 - 2019 terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kota Malang cenderung meningkat. Tetapi peningkatan ditahun 2019 tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya 0,01 poin.



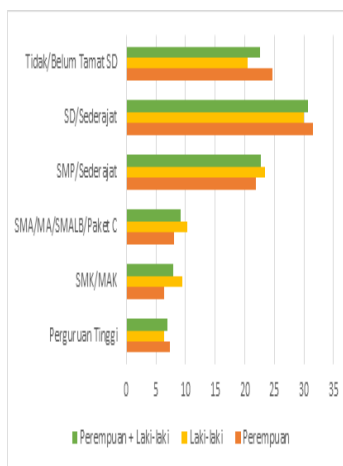
Gambar 3.2. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Malang, 2013-2019 (Persen)

Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih lama dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan mencapai 9,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki mencapai 10,97 tahun.

Rata-rata lama sekolah Kota Malang menduduki posisi keempat tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Sidoarjo dan Kota Madiun.

3.3 Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Malang tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 22,58 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 30,74 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 22,69 persen. Dengan demikian, sebanyak 76,01 persen penduduk Kota Malang usia 15 tahun ke atas hanya



Gambar 3.3. Persentase Penduduk Kota Malang Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

tamatan SMP ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas hanya 23,99 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajatnya sebesar 9,19 persen, SMK atau sederajatnya sebesar 7,92 persen sedangkan perguruan tinggi sebesar 6,88 persen.

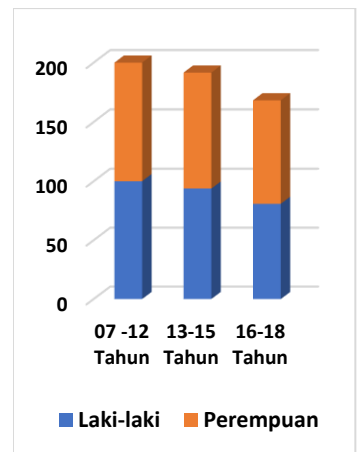
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Secara umum, APS per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.5. APS kelompok usia 7-12 tahun Kota Malang tahun 2019 telah mencapai 100 berarti bahwa penduduk Kota Malang usia 7-12 tahun 100 persen atau hampir seluruhnya telah mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa) memandang tingkatan sekolahnya).

APS perempuan kelompok usia 13-15 tahun Kota Malang tahun 2019 sebesar 95,52 persen dan APS laki-laki kelompok usia 13-15 tahun sebesar 93,83 persen lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun dan. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kota Malang usia 13-15 tahun



Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah Kota Malang Menurut Kelompok Usia, 2019

94,68 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah.

Sementara itu, APS perempuan kelompok usia 16-18 tahun Kota Malang tahun 2019 sebesar 87,4 persen dan APS laki-laki kelompok usia 16-18 tahun Kota Malang tahun 2019 sebesar 80,81 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 15,9 persen penduduk Jawa Timur usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang SMA.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Secara ringkas, APM

$$APM = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada jenjang yang sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sesuai}} \times 100$$

dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

Secara umum APM menurut kelompok usia di Kota Malang ditunjukkan pada gambar 3.8. Penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar di Kota Malang tahun 2019 sebesar 96,87 persen. Sementara itu, penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2019 sebanyak 85,3 persen. APM kelompok usia 16-18 tahun di Kota Malang tahun 2019 hanya sebesar 64,99 persen, terendah dibandingkan APM kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun. APM kelompok usia 16-18 tahun sebesar 64,99 persen dapat diartikan penduduk Kota Malang tahun 2019 usia

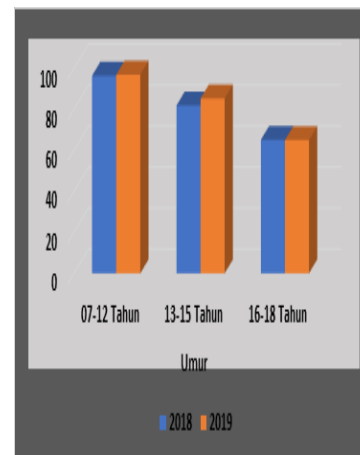
16-18 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat hanya 64,99 persen.

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kota Malang selama 4 tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal tersebut tampak jelas pada gambar 3.9. bahwa secara besaran angka rasio murid/guru semakin kecil. Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka

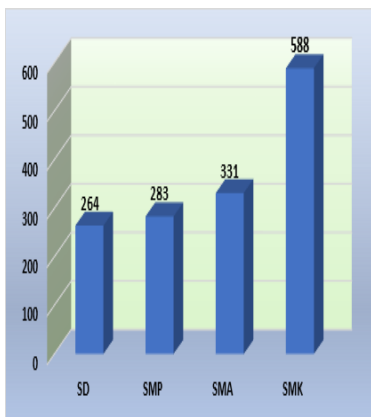


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Malang 2019

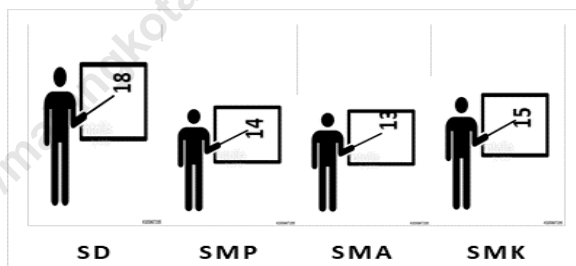
Gambar 3.5
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Usia Sekolah di Kota Malang, 2018 dan 2019

semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

Secara spasial, rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Kota Malang menunjukkan variasi pada jenjang pendidikan. Jenjang SD rasio nya sebesar 18, untuk tingkat SMP rasionya 14, SMA rasionya 13, sedangkan jenjang SMK rasionya lebih tinggi yaitu 15.



Gambar 3.6 Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Malang, 2019



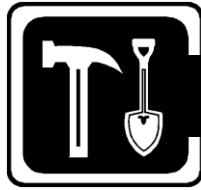
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang

Gambar 3.9 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Malang Tahun 2019

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan SD di Kota Malang cenderung menurun. Hal ini disebabkan semakin banyaknya berkurangnya unit sekolah. Untuk efisiensi operasional beberapa sekolah negeri digabung menjadi satu karena ada kecenderungan jumlah muridnya semakin sedikit. Sedangkan

jenjang SMP cenderung menurun. Ada penambahan jumlah sekolah pada empat tahun terakhir., demikian juga jenjang SMK juga cenderung menurun pada empat tahun terakhir. Sedangkan jenjang SMA rasio berfluktuasi, tetapi cenderung stagnan. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.

<https://malangkota.bps.go.id>



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Jawa Timur. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Februari dan Agustus tahun 2018-2019. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/ pendapatan bersih.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

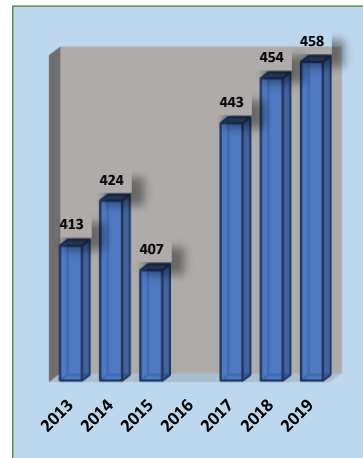
Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

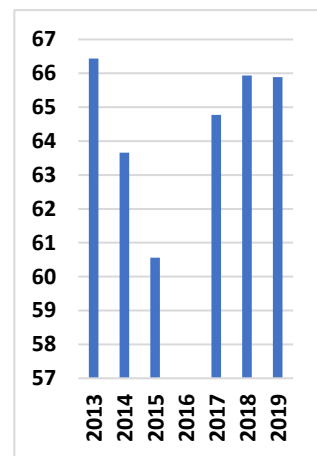
Jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 458 ribu orang, Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini cenderung meningkat Hal ini sangat terkait dengan partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Malang pada kurun waktu tersebut.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja, berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Malang. Pada Agustus 2018, TPAK Kota Malang tercatat mencapai angka



Gambar 4.1 Jumlah Angkatan Kerja, 2013-2019(Ribu Orang)

Sumber: BPS Kota Malang



Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2013-2019

Sumber : BPS Kota Malang

65,94 persen. Sedangkan Tahun 2019 turun menjadi 65,89 persen dan secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 65,89 persen penduduk Kota Malang yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 34,11 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Tabel 4.1 Penduduk Malang Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Tahun 2016 ,2016, 2017 dan 2018

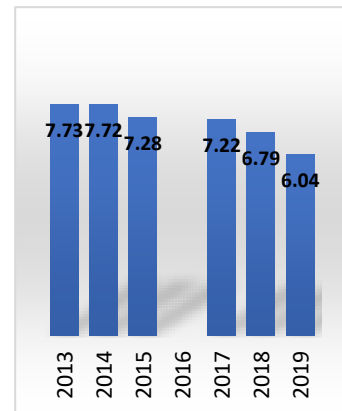
Jenis Kegiatan	2015	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk 15 Tahun ke Atas	671.937	684.015	689.812	695.378
Angkatan Kerja	406.935	443.035	454.849	458.216
Penduduk yang Bekerja	377.329	411.042	423.951	430.552
Pengangguran Terbuka	29.606	31.993	30.898	27.664
Bukan Angkatan Kerja	265.002	240.980	234.963	237.162
Sekolah	115.451	76.669	82.885	77.744
Mengurus Rumah Tangga	122.571	136.231	131.413	134.013
Lainnya	26.980	28.080	20.665	25.405
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	60,56	64,77	65,94	65,89
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,28	7,22	6,79	6,04
Pekerja Tidak Penuh	52.223	69.567	88.675	87.967
Setengah Penganggur	15.086	21.175	14.406	15.367
Paruh Waktu	37.137	48.392	74.269	72.600

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran di Kota Malang pada lima tahun terakhir (2014 – 2019) menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Pada Tahun 2014 angka pengangguran di Kota Malang sekitar 30.581 jiwa. Angka ini mengalami penurunan menjadi 29.606 jiwa pada Tahun 2015, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 31.993 jiwa, tahun 2018 menurun menjadi 30.898 jiwa, dan tahun 2019 menurun menjadi 27.664 jiwa.

Penurunan pengangguran ini dikarenakan banyaknya angkatan kerja yang beralih ke bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Informasi ini tentunya menjadi hal yang positif bagi kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung di Kota Malang dimana pembangunan fisik untuk sarana perumahan semakin-^{*} intens memiliki kapasitas menampung tenaga kerja.



Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2014-2018

Sumber : BPS Kota Malang

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dari data yang disajikan pada Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa angka TPT pada Tahun 2019 Kota Malang mencapai 6,04 persen atau menurun jika dibandingkan tahun 2018. Angka TPT di Kota Malang sebesar 6,04 persen tersebut lebih besar dibandingkan angka TPT Jawa Timur yaitu sebesar 3,92 persen. TPT Kota Malang merupakan terbesar di Jawa Timur.

4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Potret pengangguran di Kota Malang dapat dilihat pada gambar 4.4. TPT terbanyak terjadi pada penduduk lulusan SMA/MA mencapai 26 persen. Pilihan untuk meneruskan ke jenjang SMA/MA merupakan pilihan dengan harapan segera mendapatkan kerja. Tetapi hal ini tidak diikuti dengan kesempatan kerja yang sesuai dengan lulusan pada jenjang SMA/MA tersebut. Akhirnya menambah tinggi persaingan untuk

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan lulusan SMA/MA sehingga mempunyai daya saing kerja.

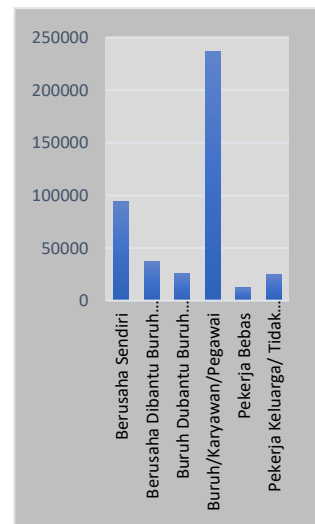
4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil Sakernas 2019, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian (pimer) mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yaitu dari 1,79 persen menjadi 1,16 persen. Kenaikan terjadi pada sektor dan jasa-jasa dari 26,21 persen pada tahun 2018 menjadi 22,80 persen pada tahun 2018 dan 72,00 persen menjadi 76,04 persen.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 55,03 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017/9 yang nilainya sebesar 58,26 persen.

Sedangkan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap mengalami kenaikan yaitu dari 4,74 persen tahun 2018 menjadi 5,93 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami peningkatan dari 18,97 persen menjadi 21,80 persen dan 7,84 persen menjadi 8,74 persen.

Kedadaan ini mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan status tetapi cenderung untuk berusaha sendiri yang dibantu buruh tidak tetap. Adanya ketentuan Upah minimum regional (UMR), menyebabkan yang berusaha sendiri untuk menggunakan pekerja tidak tetap.



Gambar 4.4
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, 2019
Sumber : BPS Kota Malana

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2019

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018	2019
--------------------------	------	------	------

Pertanian (Primer)	2,07	1,79	1,16
Manufaktur (Sekunder)	26,56	26,21	22,80
Jasa-Jasa (Tersier)	71,37	72,00	76,04
Jumlah	100,00	100,00	100,00

4.5. Jumlah Jam Kerja

Pekerja yang bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam) dikategorikan sebagai pengangguran terselubung. Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu pula seseorang yang bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau ketrampilannya. Sementara itu pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Secara umum persentase pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam atau pengangguran terselubung selama seminggu yang lalu pada tahun 2019 sebesar 19,20 persen. Pengangguran terselubung terdiri dari setengah menganggur 3,35 persen dan pekerja paruh waktu 15,84 persen.

<https://malangkota.bps.go.id>

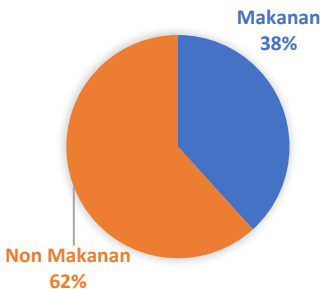


5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.



Sumber: BPS Kota Malang

Gambar 5.1
Rata-rata Pengeluaran
Perkapita Sebulan Menurut
Jenis Pengeluaran 2019

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2016-2019

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan					
	Nominal (Rp)				Persentase	
	2016	2017	2018	2019	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	523,578	632,530	597,020	465,682	38.63	37.85
Bukan Makanan	831,897	1,038,695	1,022,372	522,172	61.37	62.15
- Perumahan	401,018	516,743	478,864	255,871	29.59	30.92
- Barang dan Jasa	232,563	295,482	307,319	147,037	17.16	17.68
- Pakaian	40,429	49,382	39,021	26,541	2.98	2.95
- Barang Tahan Lama	88,078	96,332	110,949	68,023	6.50	5.76
- Lainnya	69,809	80,757	86,249	54,697	5.15	4.83
Jumlah	1,355,475	1,671,225	1,619,392	987,854	100.00	100.00

Sumber: SUSENAS Kota Malang 2016-2019

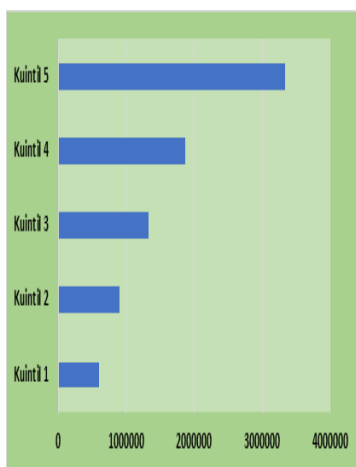
Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2018-2019 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk mengalami penurunan dari Rp 1.619.392 ,- menjadi Rp 987.854 ,-. Penurunan terjadi pada konsumsi makanan dari Rp. 597.020 ,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 465.682 ,- pada tahun 2019. Demikian juga pada pengeluaran bukan makanan juga mengalami penurunan dari Rp. 1.022.372 ,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 522.172 ,- pada tahun 2019. Pada kelompok bukan makanan, penurunan pengeluaran terjadi pada perumahan, barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, dan lainnya.

Pada Tahun 2019 persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 47,17 persen atau mengalami peningkatan

dibanding tahun 2018. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, mengalami penurunan dari 63,13 persen menjadi 52,85 persen.

Dalam kaca mata ekonomi, kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari besaran pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk, dianggap semakin sejahtera. Namun untuk memperoleh informasi tentang pendapatan rumahtangga sangatlah sulit, Susenas dalam mengukur kesejahteraan menggunakan pendekatannya pengeluaran. Secara umum jumlah pengeluaran berbanding lurus dengan pendapatan. Rumahtangga yang pengeluarannya banyak tentunya mempunyai pendapatan yang besar pula, kondisi ini dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

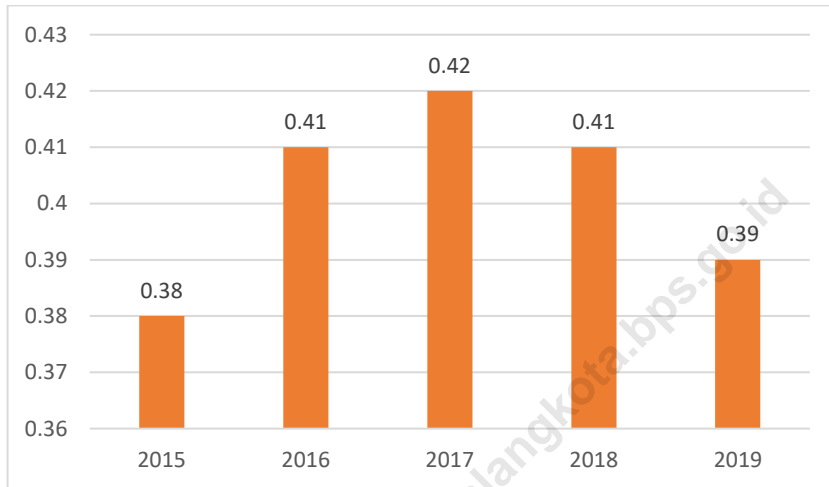
Data Susenas memberikan informasi kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada Gambar 2 terlihat rata-rata per kapita sebulan berdasarkan kuintil. Pada Kuintil ke 5 atau 20 persen jumlah penduduk terakhir rata-rata pengeluaran per kapita sebulannya mencapai Rp. 3.333.731,-, tertinggi kedua se Jawa Timur setelah Kota Surabaya.



Gambar 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kuintil Pengeluaran, 2019

Pergeseran persentase pengeluaran rumah tangga dari kelas pengeluaran yang lebih rendah ke kelas pengeluaran yang lebih tinggi, **mengandung dua kondisi, yaitu pertama terjadi karena adanya** peningkatan kesejahteraan rumah tangga atau kedua karena adanya peningkatan harga berbagai kebutuhan rumah tangga. Meningkatnya kesejahteraan penduduk biasanya juga ditandai dengan semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk keperluan makanan yang selanjutnya bergeser pada pengeluaran untuk keperluan bukan makanan.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.



* Tahun 2018 dan 2019 merupakan angka sementara

Gambar 5.3
Indeks Gini Kota Malang 2015-2018

Indeks Gini Kota Malang tahun 2017 mengalami kenaikan 0,03 poin dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 0,38 meningkat menjadi 0,41. Artinya tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran semakin meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016. Demikian juga pada tahun 2017 ketimpangan di Kota Malang meningkat 0.01 poin dibanding tahun 2016, yaitu dari 0.41 pada tahun 2016 menjadi 0.42 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 ketimpangan di Kota Malang menurun menjadi 0.41, Demikian juga pada tahun 2019 ketimpangan di Kota Malang menurun 0.02 poin dibanding tahun 2018, yaitu dari 0.41 pada tahun 2018 menjadi 0.39 pada tahun 2019.



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber

penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Susenas 2019, persentase rumah tangga di Kota Malang yang berlantaikan bukan tanah sebesar 96,27 persen. Jika dibandingkan tahun 2018 terjadi penurunan persentase.

Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016-2019

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai bukan tanah (%)	97,92	99,25	99,13	96,27
Atap beton, genteng, sirap dan asbes (%)	100	100	100	100
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	98,40	99,15	99,27	97,71

Sumber : Susenas 2016-2019

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2019 rumah tempat tinggal dengan atap beton, genteng, sirap dan asbes di Kota Malang mencapai 100 persen. Sedangkan untuk dinding terluas berupa tembok dan kayu mencapai 97,71 persen.

Pada tahun 2019 jika dilihat berdasarkan luas lantainya, ada sebanyak 17,84 persen rumah tangga dengan luas lantai kurang dari 20 m², 19,76 persen rumah tangga dengan luas lantai 20-49 m², 37,86 persen rumah tangga dengan luas lantai 50-99 m², 11,98 persen dengan luas lantai 100-149 m², dan sisanya 12,57 persen dengan luas lantai di atas 150m².

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2019, rumah tangga di Kota Malang yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 100 persen. Sedangkan yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan ledeng tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 70,86 persen turun menjadi 55,60 persen

Tabel 6.2. Persentase rumahtangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2016, 2017, 2018, dan 2019

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Air kemasan, air isi ulang & ledeng	66,44	66,64	70,86	55,60
Air minum bersih	100	100	100	100
Jamban sendiri	76,92	80,54	78,34	78,65
Jamban sendiri dengan tangki septik	81,77	83,02	87,99	86,71
Sumber penerangan listrik	100	100	100	100

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2019, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tengki septik mencapai 86,71 persen dimana hal itu merupakan penurunan dibandingkan tahun 2018 (87,99 persen).

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kota Malang yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2019 telah mencapai 100 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas,

atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Kota Malang berdasarkan hasil Susenas 2019 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 63,55 persen dan sisanya sebesar 36,45 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 27,86 persen, bebas sewa sebesar 8,43 persen, rumah dinas sebesar 0,17 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 2,28 persen. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, di Jawa Timur Kota Malang adalah kota yang memiliki persentase terkecil kedua setelah Surabaya untuk rumah tangga yang memiliki status kepemilikan rumah milik sendiri. Sebaliknya, untuk status kepemilikan kontrak/sewa, Kota Malang justru merupakan kota yang memiliki persentase tertinggi kedua setelah Surabaya. Seperti diketahui Kota Malang dan Surabaya merupakan pusat pendidikan tinggi, secara tidak langsung memicu keberadaan mahasiswa dari luar Kota Surabaya dan Malang. Untuk tempat tinggal biasanya mereka akan kost atau kontrak. Sedangkan penambahn jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Keadaan ini mengindikasikan bahwa status kepemilikan rumah tinggal di Kota Malang dan Surabaya cenderung tinggi dibandingkan kota-kota lain.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016 -2019

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik Sendiri	70,65	63,89	65,83	63,55

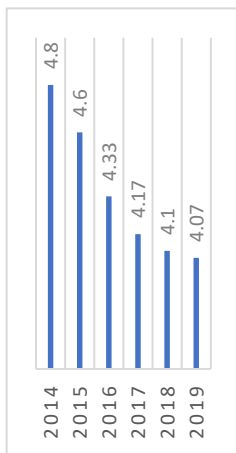
Kontrak/sewa	21,95	24,07	25,59	27.86
Bebas Sewa	6,88	11,25	6,86	8.43
Rumah Dinas	1,12	0,78	0,86	0.17
Lainnya	0,00	0,00	0,86	0.00

<https://malangkota.bps.go.id>



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.



Gambar 7.1
Persentase Penduduk
Miskin Kota Malang,
2014-2019 (Persen)

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Malang

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam misinya, *Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Malang. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Jalinkesra. Serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

Selama tahun 2016-2019, persentase penduduk miskin di Jawa Timur cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada tahun 2016 penduduk miskin Kota Malang sebesar 4,33 persen, sampai tahun 2019 turun tinggal 4,07 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Malang menduduki peringkat paling rendah kedua setelah Kota Batu di Jawa Timur.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk Kota Malang seluruh daerah merupakan perkotaan, Garis kemiskinan Kota Malang mengalami peningkatan antar waktu selama 2015-2019. Pada 2015 garis kemiskinan Kota Malang sebesar Rp. 411.709,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 543.966,- pada tahun 2019.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam

implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P_1 , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Tabel 7.1 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kota Malang, 2014-2019

Kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan	381.400	411.709	426.527	454.061	507.144	543.966
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	0,43	0,53	0,54	0,56	0,55	0,55
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,06	0,11	0,09	0,12	0,11	0,13

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mencapai 0,43 pada 2014. sampai tahun 2019 Indeks kedalaman Kemiskinan naik 0,12 poin, yaitu sebesar 0,55. Kenaikan P_1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan kata lain penduduk miskin di Kota Malang semakin sulit untuk dikeluarkan dari garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kota Malang memiliki pola yang berfluktuasi antar waktu. Pada Maret 2015 P_2 Kota Malang sebesar 0,11 dan sedikit menurun pada 2016 menjadi 0,09. Pada tahun 2018 P_2 meningkat menjadi 0,11 dan pada 2019 meningkat 0,02 poin menjadi 0,13. Nilai P_2 yang cenderung meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin melebar .

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai

dasar penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

<https://malangkota.bps.go.id>

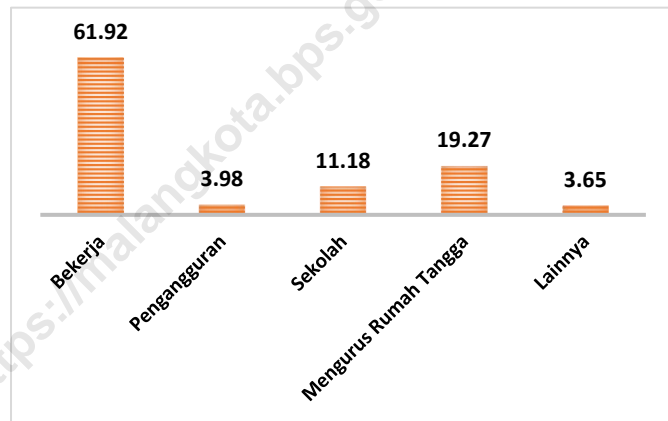


8. SOSIAL LAINNYA

8.1. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 10 tahun ke atas dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja tercatat terbanyak dibanding kegiatan lainnya (61,92 persen). Terbanyak kedua adalah penduduk yang mengurus rumah tangga (19,27 persen)



Gambar 8.1 Persentase Penduduk Kota Malang Menurut Kegiatan 2019

Distribusi penduduk ketiga yang terbesar adalah yang penduduk yang sedang bersekolah (11,18 persen). Sedangkan 3,98 persen penduduk menganggur. Selebihnya 3,65 persen penduduk melakukan kegiatan lainnya .

8.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat

penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi.

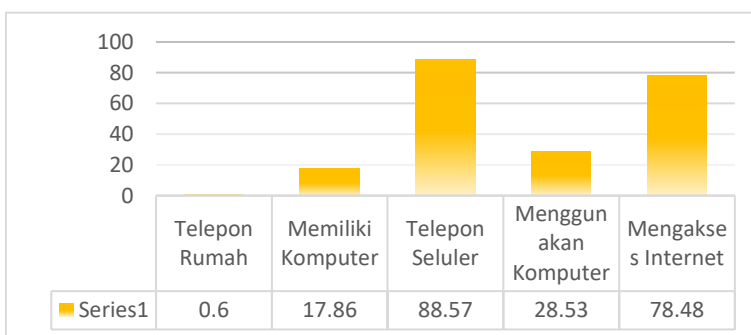
Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *hand phone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang mempunyai telepon di rumah pada tahun 2019 tercatat 0,6 persen. Kondisi ini berbeda jauh dengan rumah tangga yang anggotanya mempunyai HP yang mencapai 98,57 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Komunikasi selular, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat.

Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat BBM, facebook, whatsapp, Line dan lain sebagainya yang tidak kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Menguasai/Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Malang 2019



Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya tower signal di daerah tersebut.

Sementara, dari seluruh rumah tangga di Komputer, anggota rumah tangganya yang menguasai atau memiliki alat informasi berupa komputer atau laptop tercatat sebesar 28,53 persen. Persentase ini diduga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kota Malang.

8.3. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

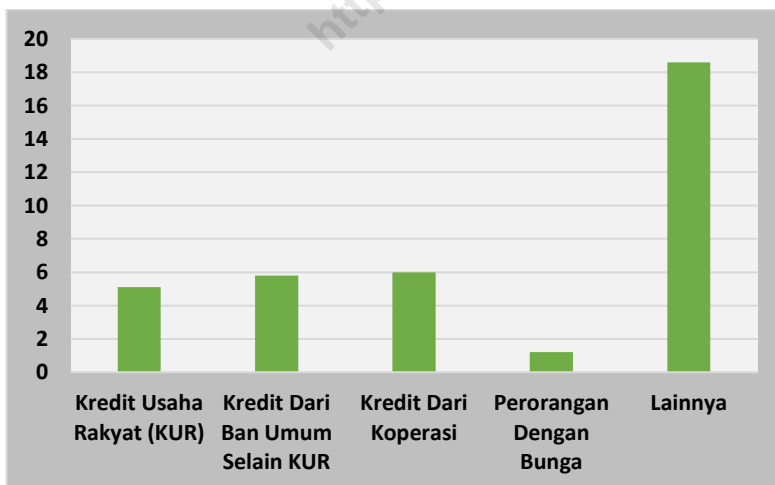
Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan

rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Rumah tangga di Kota Malang yang menerima kredit usaha rakyat (KUR) mencapai 5,1 persen, kredit bank selain KUR 5,8 persen, kredit koperasi 6 persen, kredit perorangan 1,2 persen, dan kredit lainnya 18,6 persen.

Di beberapa daerah khususnya perdesaan, usaha koperasi lebih menonjol dibanding perusahaan pembiayaan lainnya. Meskipun pada umumnya perusahaan pembiayaan di daerah sebagian besar adalah bank, koperasi tetap menjadi pilihan favorit masyarakat perdesaan. Bagi masyarakat perdesaan, prosedur pengajuan kredit melalui bank dianggap cukup rumit sehingga ada rasa takut untuk memanfaatkan kredit usaha.

Kondisi itu berbeda dengan prosedur pengambilan kredit melalui koperasi yang dianggap lebih ringkas dan jangkauannya hingga ke pelosok daerah. Selain bisa memanfaatkan sebagai tempat pemberian kredit, melalui koperasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil produksi usaha.



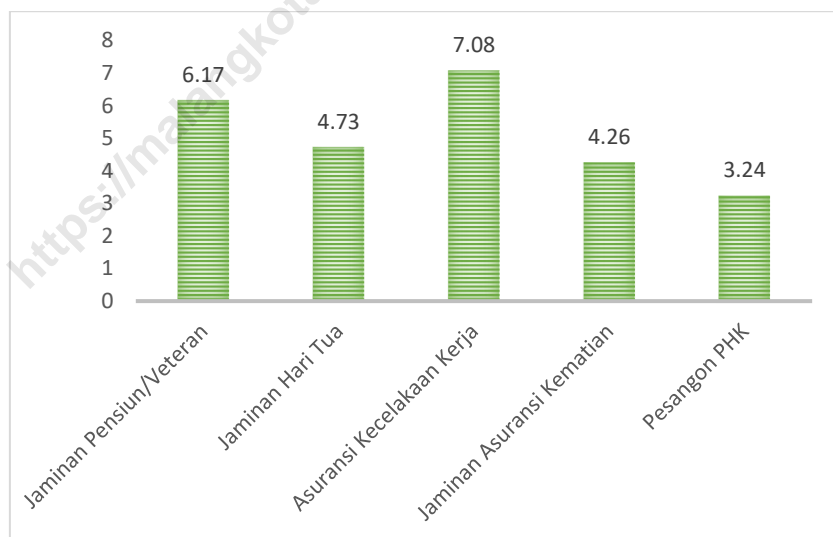
Gambar 8.3 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kota Malang 2019

Sumber: BPS Kota Malang

Bagi rumah tangga yang tidak ingin berurusan dengan

administrasi sebagai bagian prosedur pada lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan bunga tinggi. Meskipun demikian, persentase di atas 14 persen mengindikasikan ada kecenderungan meminjam uang secara individu atau kepada perseorangan untuk usaha masih menjadi alternatif favorit.

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kota Malang juga melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis. Dari seluruh penduduk Kota Malang yang berobat dan yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis tercatat sebanyak 18,78 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penerima pelayanan kesehatan gratis terdiri 19,71 persen penduduk laki-laki dan 17,87 persen penduduk perempuan.



Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga Mengenai Kepemilikan Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Selama Setahun di Kota Malang Tahun 2019

Sumber: BPS Kota Malang

Rumah tangga yang memiliki jaminan pembiayaan/asuransi terbanyak adalah asuransi kecelakaan kerja yaitu sebanyak 7,08 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah pesangon PHK yang hanya 3,24 persen.

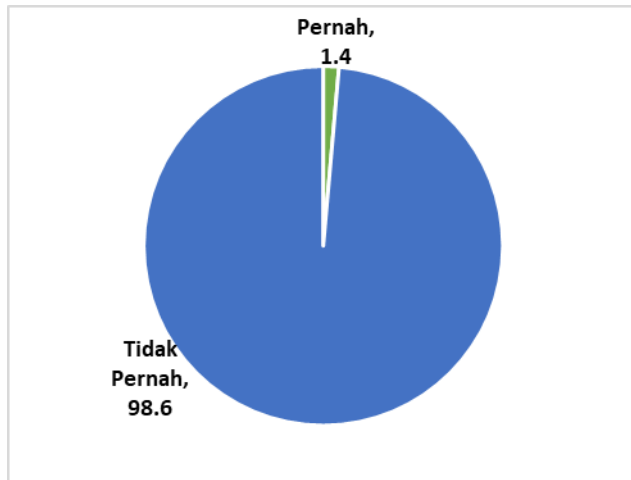
Jaminan pelayanan kesehatan di Kota Malang sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal. Dari target seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan tentunya masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

Di Kota Malang sendiri, untuk meringankan biaya berobat bagi warga miskin selain dari program layanan kesehatan yang berasal dari Pemerintah dan swasta, juga terdapat lembaga sosial lainnya yang turut menyediakan pembiayaan kesehatan gratis. Lembaga sosial tersebut bisa dalam bentuk LSM, aktivitas layanan orsos/orpol, maupun yang disediakan oleh lembaga keagamaan.

8.4. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan

Kenyamanan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan.

Pada tahun 2019 tercatat penduduk Kota Malang yang mengalami tindak kejahatan 1.4 persen. Kejahatan meliputi pencurian, penganiayaan, perampokan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.



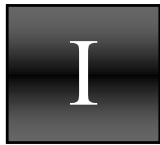
Gambar 8.5 Persentase Penduduk Kota Malang Yang Pernah Mengalami Korban Kejahatan

Sumber: BPS Kota Malang

Korban kejahatan terbanyak tercatat adalah korban pencurian, yaitu sebanyak 1,1 persen, sedangkan kejahatan yang lain juga terjadi tapi persentasenya kecil dibawah 1 persen.

LAMPIRAN

<https://malangkota.bps.go.id>



Indikator Kependudukan

No	Indikator Kependudukan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk						
	Laki-laki (Jiwa)	416.982	419.713	422.276	424.811	427.078	429.416
	Perempuan (Jiwa)	428.991	431.585	434.134	436.603	439.040	441.266
	Jumlah Laki-laki+Perempuan (Jiwa)	845.973	851.298	856.410	861.414	866.118	470.682
2	Rasio Jenis Kelamin	97,20	97,25	97,27	97,28	97,26	97,31
3	Rasio Ketergantungan	37,64	37,13	36,92	37,65	36,67	37,65
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	7.686	7.735	7.781	7.827	7.870	7.911
5	Pertumbuhan Penduduk	0,61	0,63	0,60	0,58	0,54	0,53

II

Indikator Kesehatan dan Gizi

No	Indikator Kesehatan dan Gizi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Angka Kesakitan (%)	30,78	40,69	40,09	34,88	35,50	12,36
2	Rata-rata Lama Sakit (Hari)	-	5,72	4,63	5,32		-
3	Anak Usia 0-23 tahun yang Pernah diberi ASI (%)	93,91	96,70	93,05	98,77		98,92
4	Rata-rata Lamanya Pemberian ASI pada bayi Usia 0-23 Bulan (Bulan)	10,17	8,50	-	11,32		9
5	Persentase Bayi Usia 12-59 Tahun Yang Mendapatkan Imunisasi						
	BCG	97,90	96,08	96,83	97,64	-	92,45
	DPT	97,43	98,93	95,93	95,61	94,91	89,99
	Polio	96,70	100,00	97,80	97,64	94,44	95,50
	Campak	80,72	76,15	74,43	75,63	94,91	71,24
	Hepatitis B	95,75	97,48	96,73	93,89	-	96,93
6	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan						
	Dokter	44,72	60,56	54,88	57,70	63,37	
	Bidan	55,28	38,37	42,33	42,30	36,63	
	Dukun Beranak	-	-	2,78	-	-	
7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat						
	RS Pemerintah	8,33	7,73	9,71	8,68	7,31	4,94
	RS Swasta	7,37	6,05	8,67	14,46	18,09	9,05
	Prakter Dokter/ Bidan/ Poliklinik	40,05	50,11	46,72	54,41	46,37	74,57
	Puskesmas/ Pustu	36,77	37,38	35,77	26,47	30,53	15,34
	UKBM/ Praktek Nakes	9,48	0,18	0,14	0,75	0,5	3,62
	Praktek Batra	2,00	1,67	1,02	1,89	3,02	0,80
	Lainnya	0,50	2,18	0,87	0,20	1,52	0,30

Nomer	Indikator Ketenaga Kerjaan	2014	2015	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Penduduk 15 Tahun ke Atas	665.465	671.937	684.015	689.812	695.378
2	Angkatan Kerja	423.631	406.935	443.035	458.849	458.216
3	Penduduk yang Bekerja	393.05	377.329	411.042	423.951	430.552
4	Pengangguran	30.581	29.606	31.993	30.898	27.664
5	Bukan Angkatan Kerja	241.834	265.002	240.98	234.963	237.162
6	Sekolah	97.114	115.451	76.669	82.885	77.744
7	Mengurus Rumah Tangga	124.864	122.571	136.231	131.413	134.013
8	Lainnya	19.856	26.98	28.08	20.665	25.405
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	63,66	60,56	64,77	65,94	65,89
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,22	7,28	7,22	6,79	6,04
11	Pekerja Penuh	336.795	325.106	341.475	335.276	342.585
12	Pekerja Tidak Penuh	56.255	52.223	69.567	88.675	87.967
13	Setengah Penganggur	16.985	15.086	21.175	14.046	15.367
14	Paruh Waktu	39.27	37.137	48.392	74.269	72.6
15	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	3.2	7.11	5,65		
16	Buruh/Karyawan/Pegawai	61.82	59.92	58,52		
17	FORMAL	65.02	67.04	64,17		
18	Berusaha Sendiri	20.41	16.21	17,82		
19	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	5.46	5.9	7,33		
20	Pekerja Bebas Pertanian	0.45	0.11	0,12		
21	Pekerja Bebas Non Pertanian	3.84	4.62	5,56		
22	Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	4.83	6.13	5,00		
23	INFORMAL	34.98	32.96	35,83		

IV

Perumahan

No	Indikator Perumahan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lantai Bukan Tanah	99,06	98,83	97,92	99,25	99,13	96,27
2	Atap Beton, Genteng, Sirap, seng, Asbes	100	99,77	100	100	100	100
3	Dinding Tembok dan Kayu	99,04	98,26	98,40	99,12	99,27	97,71
4	Rumah Tangga dengan Sumber air minum Bersih	99,40	99,82	99,37	100	100	100
5	Rumah Tangga dengan jamban Milik Sendiri dilengkapi Tangki Septik	80,82	82,80	83,19	80,54	87,99	86,71
6	Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik	100	100	99,80	100	100	100
7	Status Kepemilikan Rumah						
	Milik Sendiri	64,81	70,12	70,05	63,89	65,83	63,55
	Kontrak/Sewa	11,92	19,53	21,95	24,07	25,59	27,86
	Bebas Sewa	12,16	9,07	6,88	11,25	6,86	8,43
	Rumah Dinas	0,74	0,99	1,12	0,78	0,86	0,17
	Lainnya	0,00	0,29	0,00	0,00	0,86	0,00



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Entighten the Nation



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG

Jl. Raya Janti Barat No.47 Malang
Telp.(0341) 801164, Fax.(0341) 805871
Email: bps3573@bps.go.id
Website: <http://malangkota.bps.go.id>